



PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

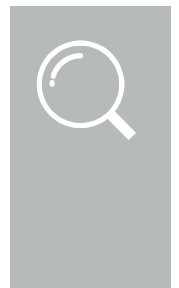
RENCANA KERJA

Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan gambaran lebih detail cara pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2023 untuk mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah



2023

Nomor PR.00/S-85/PW19/2023 Tanggal 24 Maret 2023



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa input, output, dan outcome dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya. Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan gambaran lebih detail cara pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2023 untuk mewujudkan visi dan misi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Perbaikan terus dilakukan baik secara internal maupun eksternal, dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders, sehingga komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun selama ini akan semakin memantapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang optimal dan terorganisasi.

Palu, 24 Maret 2023
Kepala Perwakilan,



Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis	6
D. Keterkaitan dengan Anggaran	7
BAB II RENCANA STRATEGIS.....	8
A. Tujuan Strategis	9
B. Sasaran Strategis.....	9
C. Sasaran Kegiatan.....	11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2023	33
A. Potret Daerah Pengawasan	33
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	37
C. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT/PKAU).....	39
D. Agenda Prioritas Pengawasan.....	40
BAB IV PENUTUP.....	42
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Korwas JFA Bidang IPP	
2. Perjanjian Kinerja Korwas JFA Bidang APD	
3. Perjanjian Kinerja Korwas JFA Bidang AN	
4. Perjanjian Kinerja Korwas JFA Bidang Investigasi	
5. Perjanjian Kinerja Korwas JFA Bidang P3A	
6. Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Umum	
7. Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Kepegawaian	
8. Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Keuangan	
9. Perjanjian Kinerja Sub Koordinator BRTK	
10. Rincian PKPT/PKAU	
11. Agenda Prioritas Pengawasan	

DAFTAR TABEL

1. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah per 01 Januari 2023
2. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan per 01 Januari 2023
3. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan per 01 Januari 2023
4. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Gender per 01 Januari 2023
5. Target dan Realisasi Nilai Optimalisasi PAD Hasil Pengawasan BPKP yang Ditindaklanjuti dengan Penetapan Kurang Bayar atas PAD
6. Target dan Realisasi Nilai Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
7. Target dan Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
8. Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
9. Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer
10. Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah
11. Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi
12. Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target
13. Target dan Realisasi Jumlah PSN yang tercapai sesuai target
14. Target dan Realisasi Jumlah Program Lintas Sektor Pembanguan Daerah yang tercapai sesuai target
15. Target dan Realisasi Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik
16. Target dan Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan
17. Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D dengan pengelolaan korporasinya baik
18. Target dan Realisasi Jumlah BUMD/BLUD dengan kinerja sehat
19. Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan
20. Target dan Realisasi Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
21. Target dan Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
22. Target dan Realisasi Jumlah pemerintah daerah dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
23. Target dan Realisasi Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik
24. Target dan Realisasi Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
25. Target dan Realisasi Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
26. Target dan Realisasi Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3
27. Target dan Realisasi Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3
28. Target dan Realisasi Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah
29. Target dan Realisasi Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
30. Target dan Realisasi Persentase Jumlah Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
31. Target dan Realisasi Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara memadai

32. Target dan Realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes
33. Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D/BLUD dengan MRI \geq Level 3
34. Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D/BLUD dengan SPI \geq Level 3
35. Target dan Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
36. Target dan Realisasi Skor IKPA Unit Kerja
37. Target dan Realisasi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
38. Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
39. Target dan Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja
40. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja
41. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
42. Sebaran PKPT Tahun 2023 per Bulan
43. Agenda Prioritas Pengawasan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai bagian dari tata kelola sistem administrasi kinerja instansi pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun suatu Rencana Strategis yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan akan dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Rencana Kerja ini memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang dijabarkan dalam bentuk kerangka kegiatan yang harus dijalankan dan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Rencana Kerja adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi suatu prasyarat terwujudnya suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan atau atas permintaan kepala daerah;
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/ BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat /Daerah/ BUMN/ BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit

- penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
 13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP

Renja Tahun 2023 ini merupakan uraian lebih lanjut dan rinci dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024. Renstra merupakan rencana umum lima tahunan, diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Renja antara lain berisikan ringkasan dari rencana strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra beserta strategi pencapaiannya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP, struktur organisasi di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

1. Kepala Perwakilan;
2. Bagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum terdiri atas:

1. Subkooor Kepegawaian;
2. Subkooor Keuangan; dan

3. Subkooor Pengelolaan Barang Milik Negara, Rumah Tangga dan Kearsipan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:

1. Jabatan Fungsional Auditor; dan
2. Jabatan Fungsional lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, terdiri atas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN)
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A).

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dipimpin oleh Koordinator Pengawasan.

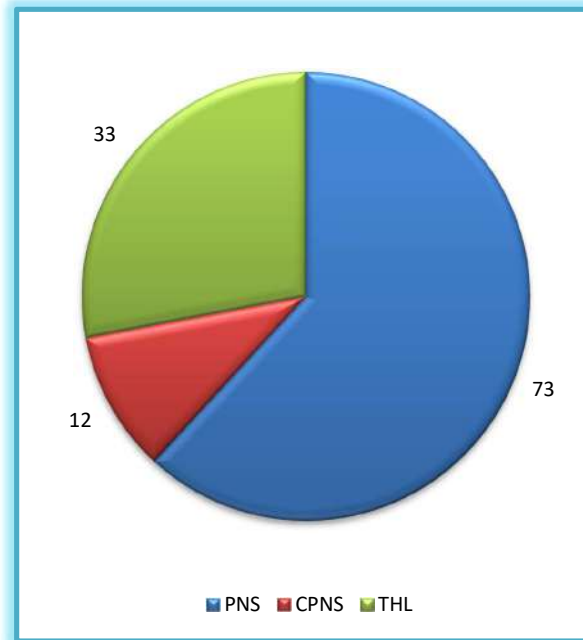
Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:



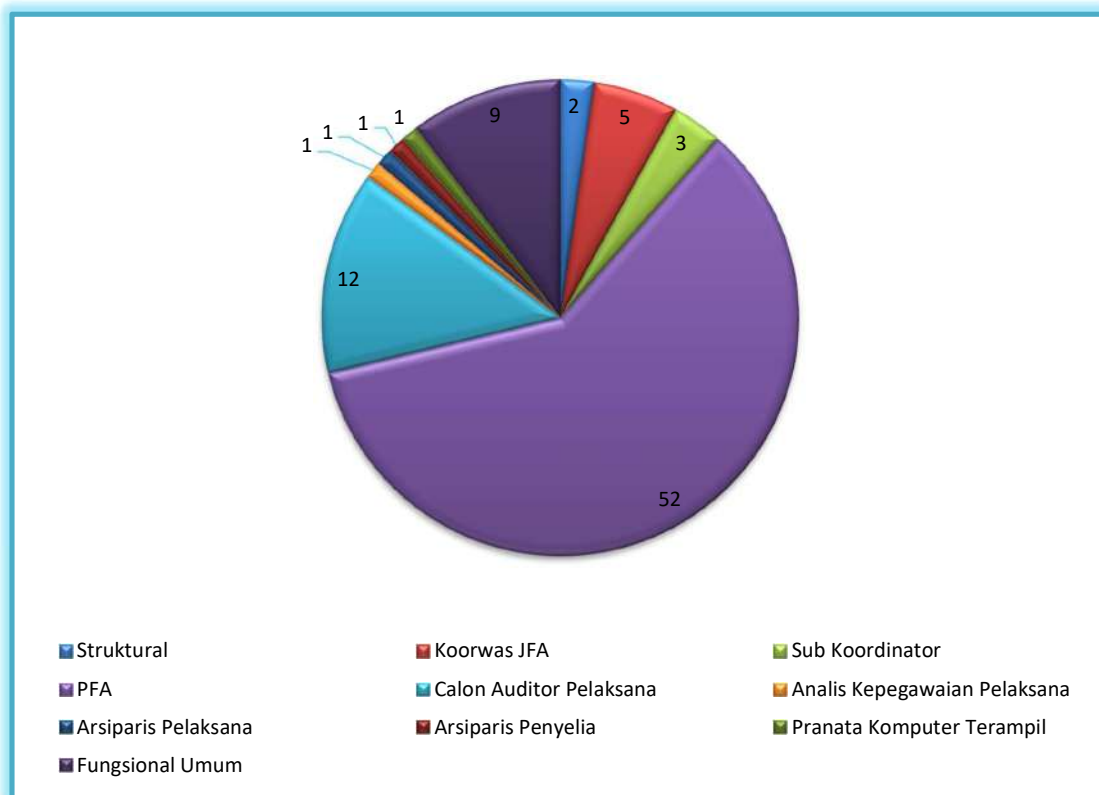
Gambar 1. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dengan posisi per 01 Januari 2023 sebagai berikut:

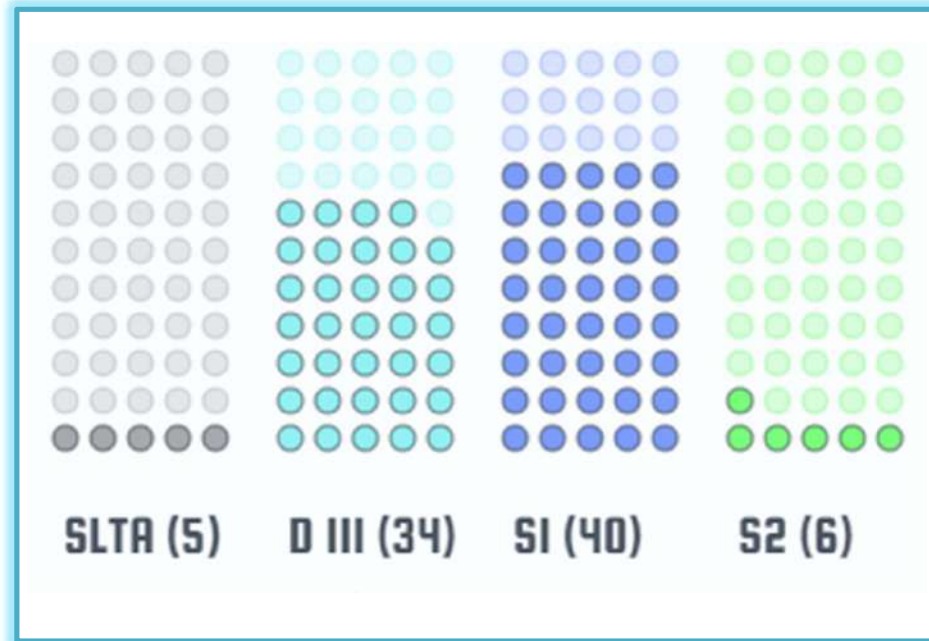
Tabel 1. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah per 01 Januari 2023



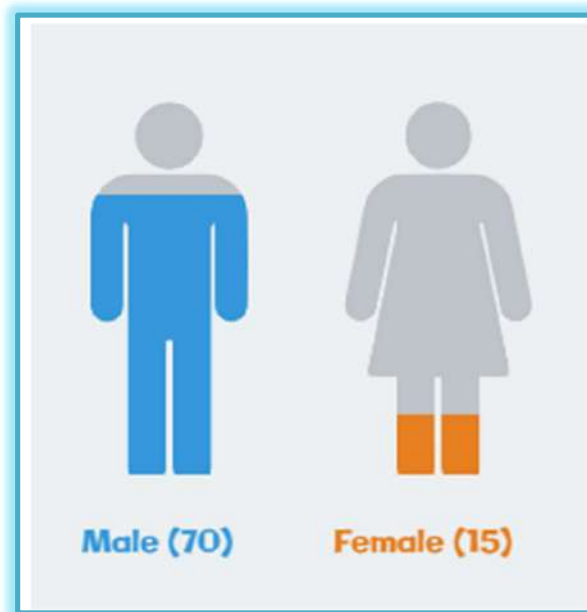
Tabel 2. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Jabatan per 01 Januari 2023



Tabel 3. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan per 01 Januari 2023



Tabel 4. Komposisi Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Gender per 01 Januari 2023



C. Keterkaitan dengan Rencana Strategis

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun Anggaran 2020-2024, dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kurun waktu lima tahun. Sebagai penjabaran dari rencana strategis, setiap

tahun disusun Rencana Kerja yang berisi tolok ukur/target sasaran/kegiatan yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun.

D. Keterkaitan dengan Anggaran

Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tidak terlepas dari penganggaran yang ada. Kaitan dengan anggaran dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan besaran anggaran kegiatan.

Volume kegiatan yang besar membutuhkan anggaran yang lebih besar pula. Sedangkan penyesuaian-penyesuaian dalam anggaran diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan juga dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP sebagai APIP yang bertanggung Sulawesi langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan/pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024.

VISI

'Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong'.

MISI

BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan:

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

A. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP di atas, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2024 yaitu:

1. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional dan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

B. Sasaran Strategis

Masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas keuangan negara dan daerah, yang diukur dengan empat indikator sebagai berikut:
 - a. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi;
 - b. Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi;
 - c. Nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah; dan
 - d. Nilai penyelamatan keuangan negara/daerah.
2. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas pembangunan nasional, yang diukur dengan dua indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target dan
 - b. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.
3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha, yang diukur dengan empat indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik;
 - b. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
 - c. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat; dan
 - d. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan.
4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektivitas pengendalian korupsi, yang diukur dengan tiga indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
 - b. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti; dan
 - c. Jumlah Pemda menindaklanjuti *Area of Improvement* dari hasil pengukuran

EPK.

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU, yang diukur dengan dua belas indikator sebagai berikut:
 - a. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
 - b. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
 - c. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
 - d. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
 - e. Jumlah Provinsi dengan Maturitas MRI \geq Level 3;
 - f. Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3;
 - g. Persentase Desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - h. Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes;
 - i. Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah;
 - j. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai;
 - k. Persentase Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3; dan
 - l. Persentase Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3.
6. Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas, yang diukur dengan delapan indikator yaitu:
 - a. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
 - b. Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);
 - c. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri);
 - d. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri);
 - e. Nilai SAKIP Unit Kerja;
 - f. Persentase penyelesaian RTP (MR Unit Kerja);
 - g. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja); dan
 - h. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan).

Tujuan dan Sasaran Strategis di atas dijabarkan ke dalam Program dan Sasaran Program Renstra BPKP Tahun 2020-2024. Selanjutnya, Program dan Sasaran Program dijabarkan ke dalam Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.

C. Sasaran Kegiatan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, terdapat penjabaran tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan, khususnya pencapaian target kinerja pemerintah. Di dalam penjabaran tersebut ditentukan bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis merupakan tanggung jawab pimpinan kementerian/lembaga. Unit kerja Eselon I bertanggung jawab atas Program dan Sasaran Program, sedangkan unit kerja Eselon II bertanggung jawab atas Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.

Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Di sisi lain, Sasaran Kegiatan merupakan Sasaran Strategis unit kerja Eselon II atau unit kerja mandiri yang memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program. Sasaran Kegiatan yang dirumuskan harus dapat mendukung tercapainya Sasaran Program.

Mengacu pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target yang menjadi tanggung jawab Perwakilan tahun 2023 adalah:

1. **Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. **Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi**

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Indikator tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah atas kurang bayar atas penerimaan daerah yang sudah ditetapkan. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri

atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain PAD yang sah.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi Nilai Optimalisasi PAD Hasil Pengawasan BPKP yang Ditindaklanjuti dengan Penetapan Kurang Bayar atas PAD

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	66	317	941	198	198	1.720
Realisasi (Rp Juta)	33	333	1.117,83			1.483,83
Capaian (%)	50,03	105,05	118,79			86,27

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator nilai optimalisasi PAD selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Capaian tahun 2021 dan 2022 sudah lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

b. Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP. Indikator tersebut diukur dengan penjumlahan nilai selisih dari potensi penerimaan dari hasil kegiatan pengawasan BPKP dengan target yang dianggarkan Pemda.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Target dan Realisasi Nilai Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	132	528		330	330	1.643
Realisasi (Rp Juta)	394	1.373				1.767
Capaian (%)	298,66	260,04				107,55

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian tahun 2020 dan 2021 sudah lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah yang Terealisasi

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam mendukung efisiensi pengeluaran negara dan daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP. Indikator tersebut diukur dengan 2 (dua) cara, yaitu:

Penjumlahan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan yang tidak tepat.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Target dan Realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	1.123	192.198,25	310.692	136.270	113.055,20	751.470,20
Realisasi (Rp Juta)	0	92.633	318.834,77			411.467,00
Capaian (%)	0	48,20	102,62			54,75

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator nilai optimalisasi PAD selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Capaian tahun 2020 dan 2021 belum memenuhi target. Sedangkan capaian tahun 2022 sudah lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

d. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam rangka pengamanan aset negara melalui kegiatan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Indikator tersebut diukur dengan menjumlahkan nilai temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan atas hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	27.124	17.745,33	20.000	56.684	52.282	173.835,33
Realisasi (Rp Juta)	2.017	51.199,44	30.363,49			83.579,93
Capaian (%)	7,43	288,52	151,82			48,08

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian tahun 2020 belum memenuhi target. Sedangkan capaian tahun 2021 dan 2022 sudah lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

e. Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran BPKP dalam peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana transfer oleh pemerintah daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah yang disetor ke kas negara/daerah berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan dana transfer kepada pemerintah daerah oleh Perwakilan BPKP.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	0	0	0	0	124,85	124,85
Realisasi (Rp Juta)	0	0	0			0
Capaian (%)	0	0	0			0

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer pada tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

f. Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur peran BPKP dalam peningkatan efisiensi dalam pengelolaan pembiayaan oleh pemerintah daerah. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan nilai rupiah yang disetor ke kas negara/daerah berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan pembiayaan kepada pemerintah daerah oleh Perwakilan BPKP.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Target dan Realisasi Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Rp Juta)	0	0	0	0	62,42	62,42
Realisasi (Rp Juta)	0	0	0			0
Capaian (%)	0	0	0			0

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator nilai penyelamatan pengelolaan dana transfer pada tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Jumlah Program Prioritas (PP) yang tercapai sesuai target

Indikator ini menggambarkan peran BPKP dalam melakukan pengawasan atas Kegiatan Strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. Indikator ini diukur dengan jumlah Program Prioritas yang mencapai target atas Program Prioritas yang dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP. Tidak terdapat target perwakilan yang harus dicapai pada tahun 2020 sampai dengan 2024.

b. Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi

Indikator ini menggambarkan peran BPKP dalam melakukan pengawasan atas Kegiatan Strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. Indikator ini diukur dengan jumlah Kegiatan Prioritas yang dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang diawasi

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2	7	2	2	7
Realisasi	2	7	2		
Capaian (%)	100	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator jumlah kegiatan prioritas yang diawasi sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target

Indikator ini menggambarkan peran BPKP dalam melakukan pengawasan atas Kegiatan Strategis yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah. Indikator ini diukur dengan jumlah Kegiatan Prioritas yang mencapai target atas Kegiatan Prioritas yang dilakukan pengawasan oleh Perwakilan BPKP. Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Target dan Realisasi Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2	0	0	0	7
Realisasi	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang tercapai sesuai target sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Target dan Realisasi Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	7	0	0	
Realisasi	0	5	0		
Capaian (%)	0	71,42	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator jumlah PSN yang tercapai sesuai target sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target

Indikator ini merupakan cerminan peran BPKP dalam rangka mendorong pencapaian target program-program lintas sektoral dalam bentuk pengawasan atas program lintas sektoral. Indikator ini diukur dengan menghitung program lintas sektoral pembangunan daerah yang dilakukan pengawasan dan telah mencapai target.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Target dan Realisasi Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	1
Realisasi	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah yang tercapai sesuai target sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

f. Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik

Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan dari pemerintah desa mencapai kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa. Indikator ini diukur dengan melakukan analisis perbandingan antara jumlah desa yang berkinerja baik dibandingkan jumlah seluruh desa yang diaudit

kinerja.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Target dan Realisasi Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik

	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	0	0	0	0	50
Realisasi (%)	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

g. Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam menyelesaikan masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan dengan menghasilkan alternatif solusi yang dapat digunakan oleh unit penanggung jawab atau pelaksana program/kegiatan. Indikator tersebut diukur dengan membagi pelaksanaan evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang terealisasi dengan hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Target dan Realisasi Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan

	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	75	80	0	85	85
Realisasi (%)	0	100	0		
Capaian (%)	0	125	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang diselesaikan tahun 2021 lebih dari 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Jumlah BUMN/D dengan pengelolaan korporasinya baik.

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pengawasan atas tata kelola BUMN/D yang dihitung dari jumlah BUMN/D di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tata kelola “Baik”.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D dengan pengelolaan korporasinya baik

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	0	0
Realisasi Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		
Target Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0	0	0
Realisasi Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	0	0	0		0
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator Jumlah BUMN/D dengan pengelolaan korporasinya baik sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Jumlah BUMD/BLUD dengan kinerja sehat

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pengawasan atas kinerja BUMD/BLUD yang dihitung dari jumlah BUMD/BLUD di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kinerja “Sehat”.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Target dan Realisasi Jumlah BUMD/BLUD dengan kinerja sehat

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	1	2	1	3	3	10
Realisasi Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	4	2	1			7
Capaian (%)	400	100	100			70
Target Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1	1	2	2	2	8
Realisasi Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	1	2	2			5
Capaian (%)	100	200	100			63

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Jumlah BUMD/BLUD dengan kinerja sehat pada tahun 2020 sampai dengan 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Indikator ini menunjukkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pengawasan atas akuntabilitas keuangan BUMDes yang dihitung dari jumlah BUMDes di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mampu menyusun laporan keuangan.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Target dan Realisasi Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target	58	73	100	120	125	476
Realisasi	61	81	140			282
Capaian (%)	105,17	110,96	140,00			59,24

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan selalu meningkat dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Capaian tahun 2020 sampai dengan 2022 sudah lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Sasaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam rangka pengawasan bidang investigasi yang berorientasi represif dalam pemberantasan korupsi. Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dengan jumlah penugasan pengawasan represif.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Target dan Realisasi Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	100	100	100	100	100
Realisasi (%)	100	100	100		
Capaian (%)	100	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

b. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya BPKP menyelenggarakan pencegahan dan pengendalian korupsi melalui instrumen pengawasan Fraud Control Plan (FCP) dan Fraud Risk Assessment (FRA), serta Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK). Indikator tersebut diukur dengan membandingkan jumlah KLPBU yang menindaklanjuti rekomendasi dengan jumlah KLPBU sasaran pengawasan preventif/edukatif.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Target dan Realisasi Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	70	75	80	85	90
Realisasi (%)	100	100	100		
Capaian (%)	142,86	133,33	125,00		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Jumlah pemerintah daerah dengan efektivitas pengendalian korupsi baik.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indikator tersebut diukur dengan jumlah pemerintah daerah yang menindaklanjuti dari hasil pengukuran efektivitas pengendalian korupsi.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Target dan Realisasi Jumlah pemerintah daerah dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Pemda)	0	0	1	3	6	10
Realisasi (Pemda)	0	0	1			1
Capaian (%)	0	0	100			10

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah pemerintah daerah dengan efektivitas pengendalian korupsi baik tahun 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

d. Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana upaya dan keberhasilan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh badan usaha. Indikator tersebut

diukur dengan jumlah badan usaha yang menindaklanjuti dari hasil pengukuran efektivitas pengendalian korupsi.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Target dan Realisasi Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik

	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
Target (Badan Usaha)	0	0	0	1	2	3
Realisasi (Badan Usaha)	0	0	0			0
Capaian (%)	0	0	0			0

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator Jumlah badan usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi baik merupakan indikator baru pada tahun 2023. Sehingga potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 belum dapat di analisis.

5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Sasaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam mendukung tercapainya Kapabilitas APIP pada pemerintah daerah secara optimal. Indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemda dengan Level Kapabilitas APIP \geq Level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Target dan Realisasi Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Jumlah Pemda Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	0	0	1	1	1
Realisasi Jumlah Pemda Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3			1		
Capaian (%)			100		
Target Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	4	4	7	10	10

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	4	5	8		
Capaian (%)	100	125	114,29		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

b. Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam mendukung tercapainya Maturitas SPIP pada pemerintah daerah secara optimal. Indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemda dengan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Target dan Realisasi Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Jumlah Pemda Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	1	1	1	1	1
Realisasi Jumlah Pemda Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	1	1	1		
Capaian (%)	100	100	100		
Target Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	8	8	9	11	13
Realisasi Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	8	9	9		
Capaian (%)	100	112,50	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sejak 2020 sampai dengan 2022 mencapai 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam

mendukung tercapainya MRI pada Pemerintah Provinsi secara optimal. Indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemprov yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Target dan Realisasi Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	0	1
Realisasi	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Target indikator Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3 ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024.

d. Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam mendukung tercapainya MRI pada Pemerintah Kabupaten/Kota secara optimal. Indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemda yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Target dan Realisasi Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1	3	3	5	7
Realisasi	0	3	3		
Capaian (%)	0	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sejak 2021 sampai dengan 2022 mencapai 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

e. Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Indikator ini untuk menilai peningkatan persentase jumlah Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja

dengan opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Indikator tersebut diukur dengan jumlah Pemda yang mencapai opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB dibandingkan dengan jumlah Pemda.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Target dan Realisasi Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0,18%	1 pemda	1 pemda	3 pemda	1,29%
Realisasi	0,18%	1 pemda	1 pemda		
Capaian (%)	100	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sejak 2021 sampai dengan 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

f. Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator ini untuk menggambarkan peran hasil pengawasan perwakilan dalam peningkatan kualitas Governance, Risk and Control dalam bentuk penyampaian rekomendasi strategis ke Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota. Indikator tersebut diukur dengan jumlah rekomendasi strategis yang bisa dihasilkan kepada para stakeholders terkait.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Target dan Realisasi Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1	0	0	0	1
Realisasi	1	0	0		
Capaian (%)	100	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

g. Persentase Jumlah Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Indikator ini merupakan salah satu cerminan peran BPKP dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui kegiatan pengawasan dana desa. Indikator tersebut diukur dengan cara melakukan analisis perbandingan antara jumlah desa yang telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah desa seluruhnya.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Target dan Realisasi Persentase Jumlah Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40,01%	829 desa	0	0	59,99%
Realisasi	99,89%	1.246 desa	0		
Capaian (%)	249,72	150,30	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Indikator Persentase Jumlah Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

h. Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara memadai.

Indikator ini merupakan salah satu cerminan peran BPKP dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa melalui kegiatan pengawasan dana desa. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Target dan Realisasi Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara memadai

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	5	20	25	394
Realisasi	0	5	20		

	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian (%)	0	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah Desa yang menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara memadai sejak 2021 sampai dengan 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dapat tercapai. Sedangkan potensi ketercapaian target tahun 2024 sebesar 394 desa, mempunyai risiko tidak tercapai.

i. Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes.

Indikator ini merupakan salah satu upaya BPKP dalam rangka penguatan kapabilitas APIP dengan memberikan dorongan kepada APIP untuk menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa. Indikator ini diukur dengan menghitung banyaknya APIP yang telah menerapkan aplikasi Siswaskeudes sebagai alat untuk melakukan pengawasan keuangan desa.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Target dan Realisasi Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	1	1			7
Realisasi	1	3			
Capaian (%)	100	300			

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

j. Jumlah BUMN/D/BLUD dengan MRI ≥ Level 3

Manajemen Risiko Indeks pada BUMN/D/BLUD menunjukkan kemampuan BUMN/D/BLUD dalam mengelola risiko yang dihadapi. Indikator ini menunjukkan keberhasilan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan pengawasan atas implementasi Manajemen Risiko pada

BUMN/D/BLUD, yang dihitung dari jumlah BUMN/D/BLUD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah dengan MRI \geq Level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D/BLUD dengan MRI \geq Level 3

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	1	2	4	6
Realisasi	0	1	2		
Capaian (%)	0	100	100		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Tren capaian realisasi indikator Jumlah BUMN/D/BLUD dengan MRI \geq Level 3 sejak 2021 sampai dengan 2022 mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

k. Jumlah BUMD/BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Kapabilitas SPI merupakan kemampuan yang dimiliki SPI agar dapat mewujudkan perannya secara efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah SPI masing-masing BUMD dan BLUD di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kapabilitas SPI \geq level 3.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Target dan Realisasi Jumlah BUMN/D/BLUD dengan SPI \geq Level 3

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	0	0	0	1	2
Realisasi	0	0	0		
Capaian (%)	0	0	0		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Target indikator Jumlah BUMN/D/BLUD dengan SPI \geq Level 3 ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023.

6. Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja

Sasaran Kegiatan Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Pengukuran skor Zona Integritas sesuai dengan kertas kerja Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas, mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Target dan Realisasi Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	82	75	80	80	84
Realisasi	86,13	88,02	90,31		
Capaian (%)	105,04	117,36	112,89		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

b. Skor IKPA Unit Kerja

Indikator ini merupakan pencapaian skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Target dan Realisasi Skor IKPA Unit Kerja

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90	95	95	95	92
Realisasi	94,27	98,25	96,09		
Capaian (%)	104,74	103,42	101,15		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Skor IKPA Unit Kerja sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

c. Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Indikator ini merupakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37
Target dan Realisasi Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100	95			100
Realisasi	100	100			
Capaian (%)	100	105,26			

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 selalu mencapai 100% (melebihi target yang ditetapkan). Namun, sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 indikator ini tidak menjadi target kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Indikator ini merupakan pengelolaan BMN baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Target dan Realisasi Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Baik	80	80	80	Baik
Realisasi	Baik	100	94,90		
Capaian (%)	100	125	118,63		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu mencapai 100% (mencapai target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

e. Nilai SAKIP Unit Kerja

Indikator ini merupakan penilaian SAKIP Unit Kerja (*Self Assesment* dengan *Quality Assurance* Inspektorat).

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39
Target dan Realisasi Nilai SAKIP Unit Kerja

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	82	80	82	82	84
Realisasi	83,47	85,17	87,30		
Capaian (%)	101,79	106,46	106,46		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Nilai SAKIP Unit Kerja sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

f. Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Indikator ini merupakan Indeks kepuasan layanan unit kerja perwakilan.

Target dan realisasi tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75	75	75	75	81
Realisasi	92,54	93,47	83,33		
Capaian (%)	123,39	124,63	111,11		

Sumber : Renstra 2020 – 2024, Laporan Kinerja Tahun 2020, Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Kinerja 2022

Capaian realisasi indikator Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 selalu lebih dari 100% (melebihi target yang ditetapkan). Melihat kondisi tersebut, potensi ketercapaian target tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai.

BAB III

RENCANA KINERJA

TAHUN 2023

A. Potret Daerah Pengawasan

Wilayah kerja Perwakilan BPKP meliputi 14 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota dan 12 Pemerintah Kabupaten. Data Makro Provinsi Sulawesi Tengah yang diolah dari BPS dan NSWi BKPM, sebagai berikut:

Uraian	Tahun		Data Makro Nasional	Indikator Nasional	Keterangan
	2021	2022			
Indeks Pembangunan Manusia	69,79%	70,28% ^{+0,70%}	72,91%	■	
Produk Domestik Regional Bruto	Rp197,441M	Rp246,987M ^{+23%}	Rp5,091,2 T		* per Triwulan III 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,86%	11,70% ^{+6,84%}	5,72%	■	* per Triwulan III 2022
Persentase Penduduk Miskin	13,00%	12,33% ^{-0,67%}	7,50%	■	* per Semester I 2022
Gini Ratio	0,326	0,308 ^{+5,42%}	0,384*	■	* per Maret 2022
Inflasi	2,14%	5,28% ^{+3,14%}	5,95%*	■	*per September 2022
Investasi PMA	Rp 41,14 triliun	Rp 77,72 triliun* ^{+88,92%}	Rp 479,3 triliun*		*per September 2022
Investasi PMDN	Rp 3,01 triliun	Rp 2,75 triliun ^{-8,34%}	Rp 860,22 triliun		
Jumlah Tenaga Kerja	1,52 juta	1,59 juta ^{+4,28%}	143,72 juta		*per Agustus
Jumlah Pengangguran	59,33 ribu*	49,10 ribu* ^{-17,24%}	8,42 juta*		*per Agustus
Angka Stunting	29,7%	-	24,4%	■	*per 2021 (SSGBI)

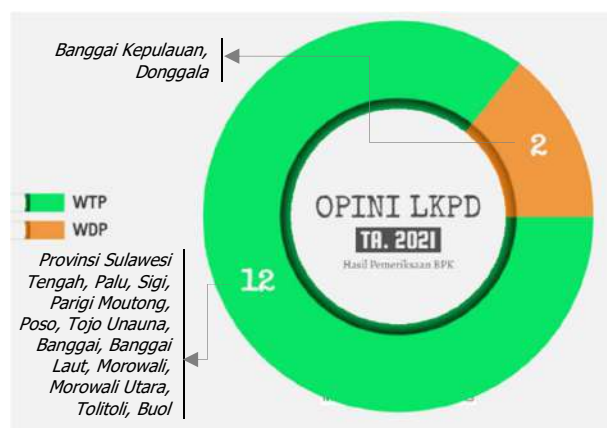
Sumber: diolah dari BPS dan NSWi BKPM

Gambaran umum terkait tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

1. PEROLEHAN OPINI ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021, terdapat 12 Pemda dengan opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 2 Pemda yakni Pemkab Donggala dan Pemkab Banggai Kepulauan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

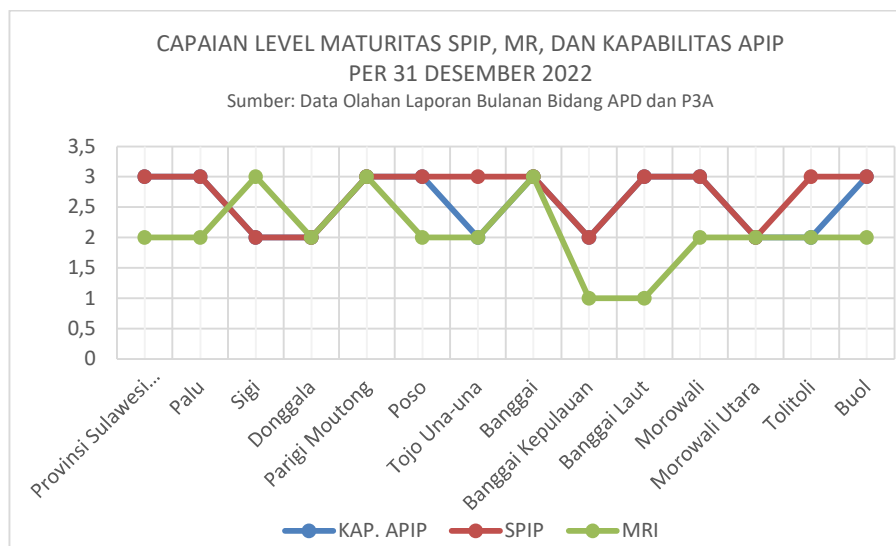
Permasalahan dan hambatan dalam Peningkatan Kualitas Opini LKPD pada



pemerintah daerah, yaitu dalam pengendalian kas, persediaan, aset tetap, Piutang dan Pendapatan, Kelemahan Pengendalian Belanja dan OPD masih belum menyusun Laporan keuangan OPD.

2. PENERAPAN GOVERNANCE, RISK AND CONTROL (GRC)

Tata kelola pemerintahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan bersama manajemen risiko dan pengendalian intern. Tiga hal ini perlu dikawal agar tujuan pemerintah sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD dapat tercapai dengan baik. Tata kelola (*Governance*), manajemen risiko (*Risk*), dan pengendalian intern (*Control*) atau biasa yang dikenal dengan nama GRC harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. GRC tidak akan lepas dari istilah SPIP sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008. Kematangan penyelenggaraan SPIP dibutuhkan sebuah instansi dengan memahami area-area yang perlu dilakukan *improvement* sehingga penerapan SPIP menjadi semakin baik dalam memberikan keyakinan yang memadai tujuan organisasi akan tercapai. Unsur-unsur dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP dan Maturitas MR. Capaian per 31 Desember 2022 atas ketiga unsur tersebut disajikan dalam grafik berikut:



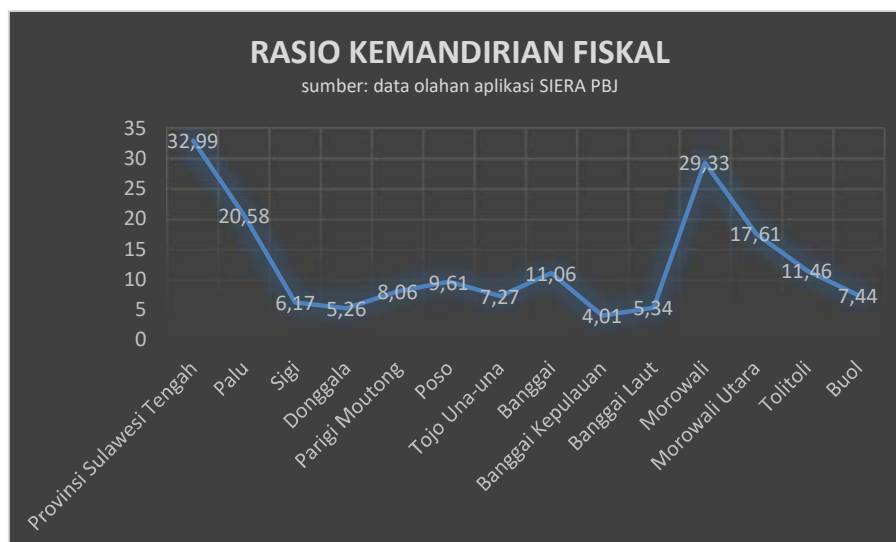
Tantangan dalam rangka peningkatan GRC wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Penerapan manajemen risiko belum optimal.
2. APIP belum melaksanakan audit kinerja berbasis risiko pada program strategis pemda yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kualitas SDM APIP mengenai pengelolaan risiko, tata kelola, dan pengendalian perlu ditingkatkan melalui workshop/bimtek/diklat.
4. Alokasi anggaran tidak memadai.
5. Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum optimal.
6. Penetapan indikator dan target baik sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan belum berkualitas baik.
7. Pengukuran kinerja belum didukung oleh penyediaan sistem pengumpulan data kinerja secara memadai,
8. Pengendalian yang dibangun belum sepenuhnya dapat menurunkan risiko,
9. Informasi risiko belum menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, dan belum seluruh pemerintah daerah menyusun risiko strategis pemda

3. KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH TAHUN 2022

Rasio kemandirian fiskal tahun anggaran 2022 pada semua pemda berada di bawah 50% dengan rata-rata se-Sulawesi Tengah sebesar 16,59%, artinya seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap pemerintah pusat atau memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Rasio kemandirian fiskal diperoleh dengan membandingkan antara total PAD dengan total pendapatan. Tingkat kemandirian fiskal paling tinggi adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 32,99%, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 4,01%.



Masih rendahnya rasio kemandirian fiskal daerah ini disebabkan oleh Kepala Bapenda belum mendesain langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan PAD khususnya pajak dan retribusi yang ada di Sulawesi Tengah dan sistem *database* wajib pajak daerah belum terdata dengan baik dan ter-*upgrade* secara reguler serta belum ada program kegiatan upaya penegakan perda sektor penerimaan.

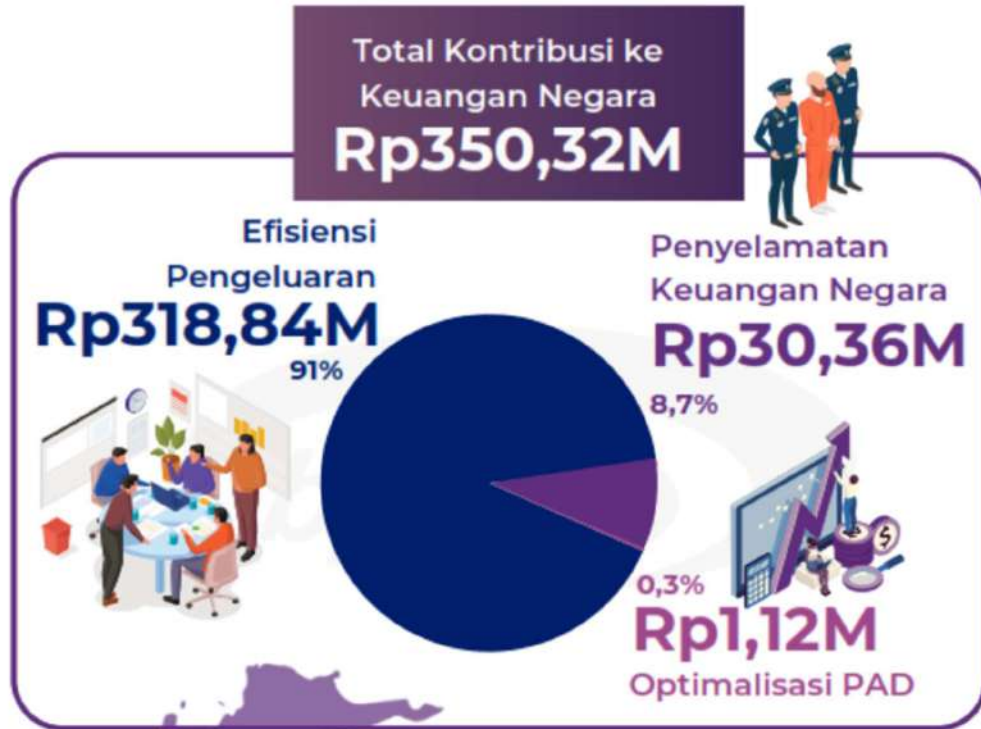
4. KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2022

Pengawasan yang dilakukan pada tahun 2022 meliputi beberapa sektor sebagai berikut:

1. Sektor Reformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - Pengawasan Program Indonesia Pintar
 - Pengawasan atas Pengajuan dan Verifikasi Klaim COVID-19
 - Pengawasan atas Vaksinasi, Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19,
 - Pengawasan atas Program bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan Tahun 2022.
2. Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
 - Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah dan PBJ
 - Evaluasi Perencanaan APBD
 - Evaluasi atas Tata Kelola dan Perencanaan Pembangunan Desa.
 - Akuntabilitas kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD.
3. Sektor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
 - Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penurunan Kemiskinan Ekstrem
4. Sektor Ketahanan Pangan
 - Evaluasi atas tata Kelola subsidi pupuk
 - Evaluasi tata Kelola cadangan pangan pemerintah
5. Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih
 - Peningkatan Kapabilitas APIP dan maturitas SPIP
 - Audit dalam rangka penyelamatan keuangan negara/daerah
6. Pengawasan Lainnya
 - Tata Kelola Sawit di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
 - Monitoring P3DN
7. Pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan Daerah

- Evaluasi Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Palu
- Pengawasan Program Pemulihan Pasca bencana Gempa Tahun 2018

Selain memberikan rekomendasi strategis kepada pemangku kepentingan, hasil pengawasan Tahun 2022 mampu menyelamatkan keuangan negara/daerah dengan rincian sebagai berikut:



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan tahun keempat periode Renstra 2020-2024 seperti pada tabel berikut:

Tabel 41
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET		BIDANG
				Satuan	Jumlah	
1		2		3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	528,00	APD
		1.2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.160,98 109,02	APD IPP
		1.3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684,00	INVESTIGASI
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00	INVESTIGASI
		2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2,00	APD
3	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	Persen	80,00	SETIAP BIDANG
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	4.1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	3,00	AN
		4.2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2,00	AN
		4.3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	120,00	AN
		4.4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10,00	AN
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100,00	INVESTIGASI
		5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	85,00	INVESTIGASI
		5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3,00	INVESTIGASI
		5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	INVESTIGASI
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	P3A
		6.2	Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab//Kota	10,00	P3A
		6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1,00	APD
		6.4	Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	11,00	APD
		6.5	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5,00	APD
		6.6	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan	Pemda	3,00	APD

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		BIDANG	
		Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	
	kinerja daerah				
	6.7 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00	APD	
	6.8 Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	APD	
	6.9 Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4,00	AN	
	6.10 Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1,00	AN	
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	80,00	TU
		7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00	TU
		7.3 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70,00	TU
		7.4 Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)	Persen	100,00	TU
		7.5 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Indeks Skala 100	75,00	TU
		7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00	TU
		7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80,00	TU

Perjanjian kinerja Perwakilan dioperasionalkan dalam rencana aksi yang memuat waktu pelaksanaan dan anggaran. Setiap indikator kinerja kegiatan diturunkan kepada bidang sebagai penanggungjawab indikator kinerja kegiatan.

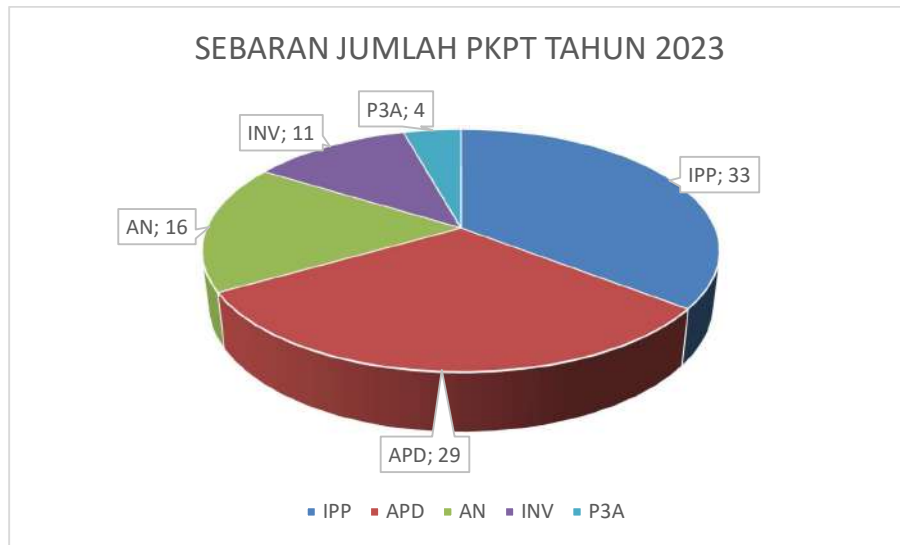
Perjanjian kinerja perwakilan diturunkan kepada setiap manajemen sebagai penanggungjawab indikator kinerja kegiatan sekaligus menjadi perjanjian kinerja kepala bagian umum, para koordinator pengawasan dan subkoordinator.

Perjanjian kinerja kepala perwakilan, kepala bagian umum, para koordinator pengawasan dan para subkoordinator seperti terlampir pada Lampiran 1 sampai dengan 9.

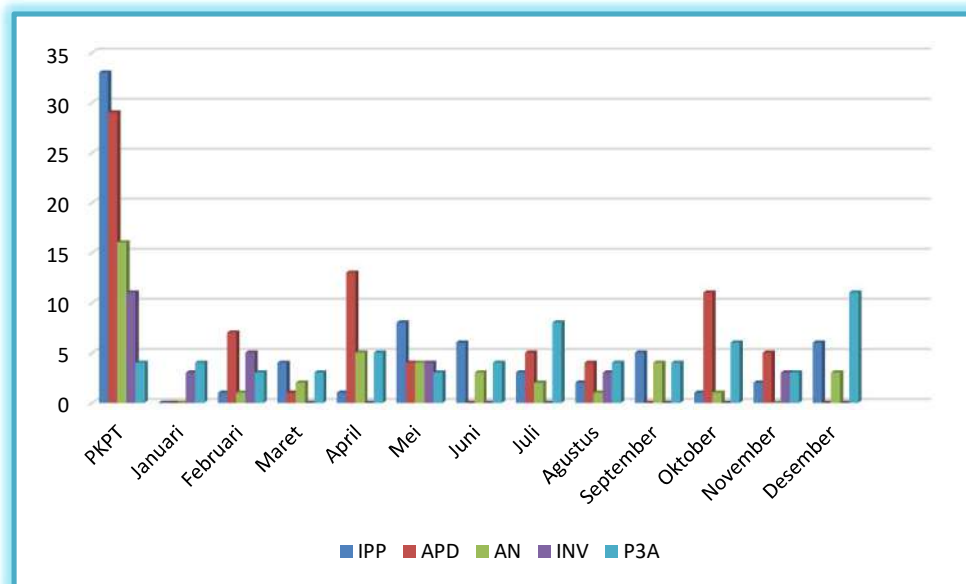
C. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT/PKAU)

Rencana Kinerja akan direalisasikan dengan sejumlah penugasan pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan administrasi umum. Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah akan dicapai dengan sebanyak 93 PKPT dan 5 PKAU.

PKPT Perwakilan akan dilaksanakan oleh Bidang IPP, APD, AN, Investigasi, P3A dan Bagian Umum setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 42
Sebaran PKPT Tahun 2023 per Bulan



Adapun rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang pelaksana dan waktu rencana masuk dan pelaporannya dapat dilihat dalam Lampiran 10.

D. Agenda Prioritas Pengawasan

Rencana Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah akan disajikan dengan mengacu pada skala prioritas yang tertuang pada Agenda Prioritas Pengawasan (APP). APP menyajikan pemetaan isu pembangunan strategis yang menjadi prioritas pengawasan BPKP, prinsip pelaksanaan pengawasan, penjabaran rencana pengawasan, distribusi pelaksana dan sebaran waktu pelaporan.

APP Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah tahun 2023 memuat sebanyak 54 topik pengawasan pusat (APP) dan sebanyak 2 tema pengawasan daerah (APPD). Penyajian output kegiatan disampaikan dalam bentuk Sintesa Hasil Pengawasan (SHP). Adapun rincian agenda pengawasan, topik, bidang pelaksana dan waktu rencana pelaporannya dapat dilihat dalam Lampiran 11.

Adapun rincian agenda prioritas pengawasan daerah, topik, bidang pelaksana dan waktu rencana pelaporannya adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Agenda Prioritas Pengawasan Daerah

No	Nama Cluster	Tema Pengawasan	Rendal	Target TRW				Pelaksana
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	D.1.2	-	v	-	-	APD
2	Ketahanan Pangan	Pembangunan Kawasan Pangan Nasional	D.1.2	-	-	v	-	AN

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun dan merupakan penjabaran Renstra Tahun 2020-2024 sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Renja memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan didukung dengan kebijakan yang berlaku. Indikator kinerja telah dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan sasaran kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja organisasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

PERJANJIAN KINERJA KORWAS JFA BIDANG IPP TAHUN 2023

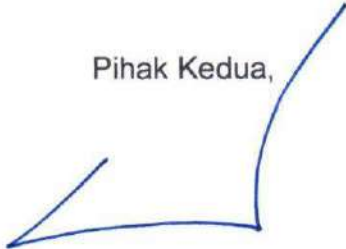
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Heru Siswanto
Jabatan : Korwas JFA Bidang Instansi Pemerintah Pusat
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,

Heru Siswanto
NIP 19681212 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG IPP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		Satuan	Jumlah		
1	2	3	4		
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	109,02
		2	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	0,00
2	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00

Program

Pengawasan Pembangunan di
Perwakilan Rp

Anggaran

739.544.000

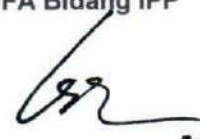
Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Korwas JFA Bidang IPP



Heru Siswanto
NIP. 19681212 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG IPP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP			PKPT		TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	A.1.a	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	A.1.a.00	Pengawasan atas Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	-	V	-	-	-	-	V	-	
2	A.1.c	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	A.1.c.00	Pengawasan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	-	V	-	-	-	V	-	
3	A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	A.1.d.00	Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi	-	-	V	-	-	-	V	-	
4	A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	A.2.a.00	Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional	-	V	-	-	-	-	V	-	
5	A.2.b	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	A.2.b.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer	-	V	-	-	-	-	V	-	
6	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	A.2.c.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan	-	V	-	-	-	-	V	-	
7	A.2.d	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	A.2.d.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Kualitas dan Redistribusi Nakes	-	V	-	-	-	-	V	-	
8	A.2.e	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	A.2.e.00	Pengawasan atas Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	-	V	-	-	-	-	V	-	
9	A.2.g	Akuntabilitas penanganan Covid-19	A.2.g.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan Covid-19	V	-	-	-	-	V	-	-	
10	A.2.h	Percepatan Penurunan Stunting	A.2.h.00	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	-	V	-	-	-	-	V	-	
11			A.2.i.00	Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif	-	V	-	-	-	-	V	-	
12	A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	A.3.a.00	Pengawasan atas Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	-	-	-	V	-	-	V	-	
13	A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	A.3.b.00	Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial	V	-	-	-	-	V	V	V	
14	A.3.f	Efektivitas Penguatan Kemiskinan Ekstrem	A.3.f.00	Pengawasan atas Efektivitas Penguatan Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	-	V	-	-	V	
15	B.1.b	Infrastruktur SPAM	B.1.b.00	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM	-	V	-	-	-	-	-	V	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG IPP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

Lampiran 1-4/5
Rencana Kerja 2023
Korwas JFA Bidang IPP

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
16	B.1.c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	B.1.c.00	Pengawasan atas Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	-	V	-	-	-	V	-	V		
17	B.2.d	Pembangunan Bandara	B.2.d.00	Pengawasan atas Pembangunan Bandara	-	V	-	-	-	V	-	V		
18	B.2.e	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	B.2.e.00	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur sektor Pelabuhan	-	V	-	-	-	V	-	V		
19	B.3.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	B.3.a.00	Pengawasan atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	-	-	-	V	-	V	-	V		
20	B.3.c	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	B.3.c.00	Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia	V	-	-	-	V	-	-	-		
21	C.1.e	Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana	C.1.e.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana	-	-	V	-	-	-	V	-		
22	D.3.b	Kemudahan Perizinan Berusaha	D.3.b.00	Pengawasan atas Kemudahan Perizinan Berusaha	-	-	V	-	-	-	V	-		
23	D.3.f	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	D.3.f.00	Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	-	-	V	-	-	-	V	-		
24	G.3.a	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	G.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	V	-	-	-	V	-	-	-		
25	G.3.c	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	G.3.c.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	-	-	-	V	V	V	-	V		
26			I.1.d.00	Pengadaan ASN Tahun 2023	-	-	-	V	-	-	-	V		
27			I.1.g.00	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	V	V	V	V	V	V	V	V		
28			I.1.i.00	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	-	-	V	-	-	-	V	-		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG IPP
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA			1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
29			I.1.j.00	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	-	-	-	V	-	-	-	-	V	
30			I.1.k.00	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	-	-	-	V	-	-	-	-	V	
31			I.1.o.00	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	-	V	-	V	-	-	V	-	V	
32			I.1.p.00	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	-	V	-	V	-	V	-	-	V	
33			I.1.x.00	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Santiasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	-	-	V	-	-	-	V	-	V	

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Perwakilan

Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Korwas JFA Bidang IPP

Heru Siswanto
NIP. 19681212 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA KORWAS JFA BIDANG APD TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Ari Sulistiyono
Jabatan : Korwas JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Iwan Ari Sulistiyono
NIP 19740131 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG APD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	528,00
		2	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136.160,98
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	1,00
3	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	1,00
		2	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	11,00
		3	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	5,00
		4	Persentase jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3,00
		6	Jumlah desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25,00
		7	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00

Program

Pengawasan Pembangunan di Rp
Perwakilan

Anggaran

1.403.731.000

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Perwakilan

Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Korwas JFA Bidang APD


Iwan Aji Sulistiyono
NIP. 19740131 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG APD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

Lampiran 2 -3/5
 Rencana Kerja 2023
 Korwas JFA Bidang APD

No	APP		PKPT		TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	A.2.c.02	Pengawasan atas Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	-	V	-	-	-	V	-	-
2	A.2.i	Skema Kesehatan Adaptif	A.2.h.01	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	-	V	-	-	-	V	-	-
3	A.3.d	Implementasi Bansos APBD	A.3.d.00	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD	-	-	-	V	-	-	-	V
4	A.3.e	Implementasi Bansos APBDdesa	A.3.e.00	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBDdesa	-	-	-	V	-	-	-	V
5	A.3.f	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	A.3.f.01	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	-	-	-	V	-	-	-	V
6	B.1.a	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	B.1.a.01	Pengawasan atas Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan Rakyat)	-	V	-	V	-	V	-	V
7	B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan	B.2.a.01	Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan	-	V	-	V	-	V	-	V
8	C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	C.2.a.00	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	V	-	-	-	V	-	-	-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG APD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

Lampiran 2 -4/5
Rencana Kerja 2023
Korwas JFA Bidang APD

No	APP			PKPT		TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA		1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
9	C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	C.2.b.00	Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		V	V	V	V	V	V	V	V
10	C.2.c	Optimalisasi PAD	C.2.c.00	Pengawasan atas Optimalisasi PAD		-	V	-	-	-	V	-	-
11	C.2.d	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	C.2.d.00	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah		-	V	-	-	-	V	-	-
12	C.2.e	Efektivitas Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)	C.2.e.00	Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum		-	-	V	-	-	-	V	-
13	C.2.g	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	C.2.g.00	Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah		V	V	V	V	V	V	V	V
14	C.3.a	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	C.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa		V	-	-	-	V	-	-	-
15	C.3.b	Akuntabilitas Keuangan Desa	C.3.b.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa		V	V	V	V	V	V	V	V
16	C.3.c	Akuntabilitas Aset Desa	C.3.c.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa		-	V	-	-	-	V	-	-
17	D.3.a	P3DN	D.3.a.02	Pengawasan atas P3DN - APD		-	V	V	-	-	V	V	-
18	E.3.b	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	E.3.b.00	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		-	-	V	-	-	-	V	-
19	G.1.a	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	G.1.a.00	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI		-	-	-	V	-	-	-	V

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG APD
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

Lampiran 2-5/5
Rencana Kerja 2023
Korwas JFA Bidang APD

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA			1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5			1	2	3	4	1	2	3	4
20	G.1.b	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	G.1.b.00	Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional			V	V	V	V	V	V	V	V
21	APPD	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	H.5.c.00	Pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan Daerah - Pelaksanaan			-	V	-	-	-	V	-	-
22			I.1.g.06	Revisi atas Tata Kelola PSN Kawasan Ekonomi Khusus			V	V	V	V	V	V	V	V
23			I.2.b.00	Konsultansi atas Implementasi FMS pada Pemda			-	-	-	V	-	-	-	V
24			I.2.c.00	Konsultansi atas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)			-	V	-	-	-	V	-	-
25			I.2.d.00	Konsultansi atas Peningkatan Kualitas Opini LKPD			V	-	-	-	V	-	-	-
26			I.2.e.00	Pengawasan atas Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah			-	-	-	V	-	-	-	V
27			I.2.f.00	Bimbingan Teknis atas Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)			-	V	-	V	-	V	-	V
28			I.2.h.00	Bimbingan Teknis atas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa			-	V	-	V	-	V	-	V
29			I.2.i.00	Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa			-	V	V	V	-	V	V	V

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Perwakilan

Eveni Sihombing

NIP. 19730619 199903 1 001

Korwas JFA Bidang APD

Iwan Sulistyono

NIP. 19740111 199502 1 001

PERJANJIAN KINERJA KORWAS JFA BIDANG AN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendro Novianto Sujarwo
Jabatan : Korwas JFA Bidang Akuntan Negara
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

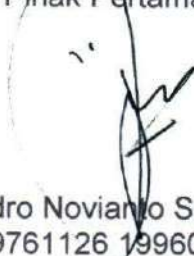
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Hendro Novianto Sujarwo
NIP 19761126 199601 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG AN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2	3	4	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	1,00
2	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	1	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	3,00
		2	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2,00
		3	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	120,00
		4	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	10,00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4,00
		2	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1,00

Program

Pengawasan Pembangunan di Rp
Perwakilan

Anggaran

530.201.000

Kepala Perwakilan

Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Korwas JFA Bidang AN

Hendro Novianto Sujarwo
NIP. 19761126 199601 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG AN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

Lampiran 3 -3/4
Rencana Kerja 2023
Korwas JFA Bidang AN

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA			1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	A.1.d.01	Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi	-	-	V	-	-	-	-	V	-	-
2	A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	A.2.a.01	Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
3	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	A.2.c.01	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
4	B.1.b	Infrastruktur SPAM	B.1.b.01	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-
5	B.2.e	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	B.2.e.01	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	-	V	-	V	-	V	-	-	-	V
6	C.4.b	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	C.4.b.00	Pengawasan Akuntabilitas atas BUMD (fokus pada BU Jasa Air)	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
7	C.4.c	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	C.4.c.00	Pengawasan atas BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
8	C.4.d	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	C.4.d.00	Pengawasan Akuntabilitas atas BLU/D (fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	-	V	-	-	-	V	-	-	-	-
9	D.2.b	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM	D.2.b.01	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM	V	-	-	-	V	-	-	-	-	-
10	D.3.a	P3DN	D.3.a.03	Pengawasan atas P3DN pada BLU/D dan BUMD	-	V	-	V	-	V	-	-	V	-
11	E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	E.3.a.01	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat - Pelaksanaan	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
12	G.1.g	Manajemen Risiko Badan Usaha	G.1.g.00	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	-	-	-	V	-	V	-	-	-	V
13	APPD	Pembangunan Kawasan Pangan Nasional	H.6.g.00	Pengawasan atas Program Pembangunan Kawasan Pangan Nasional	-	-	V	-	-	-	-	-	V	-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG AN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
14			1.1.g.05	Pengawasan atas Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	V	V	V	V	V	V	V	V		
15			1.1.r.00	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Ketenagalistrikan	V	V	V	V	V	V	V	V		
16			1.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa	-	-	V	-	-	-	V	-		

Kepala Perwakilan

Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Korwas JFA Bidang AN

Hendro Novanto Sujanwo
NIP. 19781126 199601 1 001

PERJANJIAN KINERJA KORWAS JFA BIDANG INVESTIGASI TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

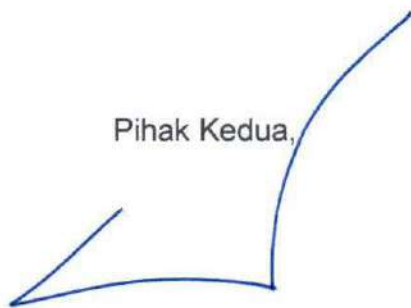
Nama : Rudi Haryanto
Jabatan : Korwas JFA Bidang Investigasi
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Rudi Haryanto
NIP 19681119 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG INVESTIGASI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1	SASARAN KEGIATAN	2	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			3	4	Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684,00	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85,00	
3	Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00	
		2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	85,00	
		3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3,00	
		4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1,00	

Program

Pengawasan Pembangunan di
Perwakilan Rp

Anggaran

415.218.000

Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing

NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Korwas JFA Bidang Investigasi



Rudi Haryanto

NIP. 19681119 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG INVESTIGASI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP			PKPT			TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4
1	A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	A.3.a.01	Pengawasan Transformasi dan Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	F.4.c.00	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	V	-	-	-	V	-	-	-
2	A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial P3DN	A.3.b.01	Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial	F.4.c.00	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	V	-	-	-	V	-	-	-
3	D.3.a	Tata Kelola Industri Tambang, meliputi: - Batubara (TW1); - Timah (TW2); - Bauksit (TW3); - Nikel (TW4)	D.3.a.00	Pengawasan atas P3DN - Investigasi	F.4.a.00	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	-	V	-	-	-	V	-	-
4	D.3.d	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	D.3.d.00	Pengawasan atas Tata Kelola Industri Tambang - Nikel	F.4.c.00	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	V	-	-	-	V	-	-	-
5	F.4.a	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	F.4.a.00	Pengendalian Keurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	G.1.e.00	Pengendalian Keurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	V	-	-	-	-	-	-	V
6	F.4.c	Pengendalian Keurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	F.4.c.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	G.3.a.01	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilih Tetap (DPT)	V	-	-	-	V	-	-	-
7	G.1.e	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilih	G.1.e.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah - PH & Klaim	G.3.b.00	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar	-	V	-	-	-	V	-	-
8	G.3.a	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	G.3.a.01	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah - PH & Klaim	G.3.b.00	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar	-	V	-	-	-	V	-	-
9	G.3.b	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	G.3.b.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah - PH & Klaim	I.4.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah - Non PH & Klaim	-	-	V	-	-	-	V	-
10			I.4.a.00											
11			I.4.a.00				V	-	-	-	-	-	-	V

Kepala Perwakilan
Eventi Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Korwas JFA Bidang Investasi
Rudi Haryanto
NIP. 19681119 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA KORWAS JFA BIDANG P3A TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tumbur Parulian Simatupang

Jabatan : Korwas JFA Bidang P3A

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing

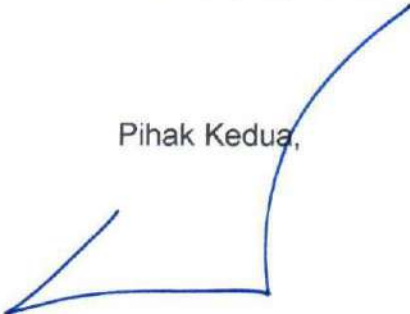
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Pa'u, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Tumbur Parulian Simatupang
NIP 19651004 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG P3A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggungjawab Perwakilan BPKP	1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	Persen	80,00
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	1,00
	2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	10,00

Program

Pengawasan Pembangunan di Rp
Perwakilan

Anggaran

460.126.000

Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Korwas JFA Bidang P3A



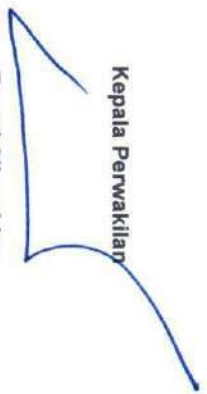
Tumbur Parulian Simatupang
NIP. 19651004 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KORWAS JFA BIDANG P3A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP		PKPT		TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1	G.1.c	Kapabilitas APiP - Pemerintah Daerah	G.1.c.00	Kapabilitas APiP - Pemerintah Daerah	V	-	-	-	-	-	-	V
2			I.2.a.00	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	-	-	V	V	-	-	V	V
3			I.2.g.00	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	-	V	-	V	-	V	-	V
4			I.5.a.00	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan (PAEP dan P3A)	V	V	V	V	V	V	V	V

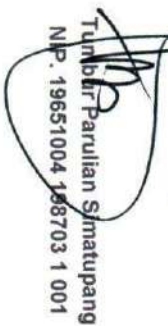
Palu, 24 Maret 2023

Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

Korwas JFA Bidang P3A



Tunjung Parulian Simatupang
NIP. 19651004 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wakhidin
Jabatan : Kepala Bagian Umum
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Evenri Sihombing
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Evenri Sihombing
NIP 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,

Wakhidin
NIP 19690830 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	80,00
	2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00
	3 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70,00
	4 Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
	5 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75,00
	6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00
	7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Indeks Skala 100	80,00

Program

Pelaksanaan Dukungan
Manajemen

Rp

Anggaran

18.313.811.000

Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing

NIP. 19730619 199903 1 001

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Usaha



Wakhidin

NIP. 19690830 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
APP DAN PKPT

No	APP		PKPT		TRW RMP				TRW RPL			
	KODE	NAMA	KODE	NAMA	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1			K.2.a.00	Layanan Perencanaan, Keuangan, SDM, Komunikasi, dan Umum	V	V	V	V	V	V	V	V
2			K.2.b.00	Layanan Penyelenggaraan SPIP dan RB	V	V	V	V	V	V	V	V
3			K.2.c.00	Layanan Manajemen Dukungan Pengawasan	V	V	V	V	V	V	V	V
4			K.2.e.00	Layanan Perkantoran	V	V	V	V	V	V	V	V
5			K.2.f.00	Layanan Sarana Internal	V	V	V	V	V	V	V	V

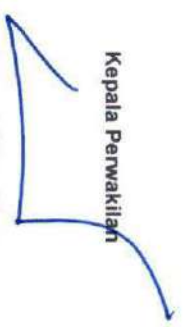
Palu, 24 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Usaha



Wakhidh
NIP. 19690830 199003 1 001

Kepala Perwakilan



Evenri Sihombing
NIP. 19730619 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasanuddin
Jabatan : Sub Koordinator Kepegawaian
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Wakhidin
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Wakhidin
NIP 19690830 199003 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Hasanuddin
NIP 19810517 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KEPEGAWAIAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	80,00
	2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82,00
	3 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)	Persen	70,00
	4 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	75,00

Program

Pelaksanaan Dukungan
Manajemen Rp

Anggaran

131.232.000

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Usaha



Wakhidin

NIP. 19690830 199003 1 001

Sub Koordinator Kepegawaian



Hasanuddin

NIP. 19810517 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA SUB KOORDINATOR KEUANGAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransiskus Lucky Arif Wicaksana

Jabatan : Sub Koordinator Keuangan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Wakhidin

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Wakhidin
NIP 19690830 199003 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Fransiskus Lucky Arif Wicaksana
NIP 19870407 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR KEUANGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95,00

Program

Pelaksanaan Dukungan
Manajemen Rp

Anggaran

14.877.549.000

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Usaha



Wakhidin

NIP. 19690830 199003 1 001

Sub Koordinator Keuangan



Fransiskus Lucky Arif Wicaksana

NIP. 19870407 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN BMN, RUMAH
TANGGA, DAN KEARSIPAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Mahendra
Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan BMN, Rumah Tangga,
dan Kearsipan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Wakhidin
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Wakhidin
NIP 19690830 199003 1 001

Palu, 24 Maret 2023
Pihak Pertama,



Roy Mahendra
NIP 19840327 200701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN BMN, RUMAH TANGGA, DAN KEARSIPAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Satuan	Jumlah
1		2		3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1	Persentase penyelesaian RTP (MR Unit kerja)	Persen	100,00
		2	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	80,00

Program

Pelaksanaan Dukungan
Manajemen Rp

Anggaran

3.305.030.000

Palu, 24 Maret 2023

Kepala Bagian Tata Usaha



Wakhidin

NIP. 19690830 199003 1 001

Sub Koordinator Pengelolaan BMN,
Rumah Tangga, dan Kearsipan



Roy Mahendra

NIP. 19840327 200701 1 001

Program Kerja Pengawasan Tahunan

No	Kode PKPT/PKAU	PKPT/PKAU	Bid/Bag	TRW RMP				TRW RPL			
			Pelaksana	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	A.1.a.00	Pengawasan atas Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	IPP	-	v	-	-	-	-	v	-
2	A.1.c.00	Pengawasan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
3	A.1.d.00	Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
4	A.2.a.00	Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
5	A.2.b.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Primer	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
6	A.2.c.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Layanan Rujukan	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
7	A.2.d.00	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan - Kualitas dan Redistribusi Nakes	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
8	A.2.e.00	Pengawasan atas Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
9	A.2.g.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan Covid-19	IPP	v	-	-	-	v	-	-	-
10	A.2.h.00	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
11	A.2.i.00	Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif	IPP	-	v	-	-	-	v	-	-
12	A.3.a.00	Pengawasan atas Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
13	A.3.b.00	Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial	IPP	v	-	-	-	v	-	-	-
14	A.3.f.00	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v
15	B.1.b.00	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM	IPP	-	v	-	-	-	v	-	v
16	B.1.c.00	Pengawasan atas Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan Sanitasi	IPP	-	v	-	-	-	v	-	v
17	B.2.d.00	Pengawasan atas Pembangunan Bandara	IPP	-	v	-	-	-	v	-	v
18	B.2.e.00	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur sektor Pelabuhan	IPP	-	v	-	-	-	v	-	v
19	B.3.a.00	Pengawasan atas Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v
20	B.3.c.00	Pengawasan atas Pembangunan Satu Data Indonesia	IPP	v	-	-	-	v	-	-	-
21	C.1.e.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
22	D.3.b.00	Pengawasan atas Kemudahan Perizinan Berusaha	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
23	D.3.f.00	Pengawasan atas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
24	G.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	IPP	v	-	-	-	v	-	-	-
25	G.3.c.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v
26	I.1.d.00	Pengadaan ASN Tahun 2023	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v
27	I.1.i.00	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
28	I.1.j.00	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Minum Perdesaan	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v

No	Kode PKPT/PKAU	PKPT/PKAU	Bid/Bag	TRW RMP				TRW RPL			
			Pelaksana	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	I.1.k.00	Reviu atas Laporan Verifikasi Konsultan atas Program Hibah Air Limbah Setempat	IPP	-	-	-	v	-	-	-	v
30	I.1.o.00	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	-	v	-	v	-	v	-	v
31	I.1.p.00	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	IPP	-	v	-	v	-	v	-	v
32	I.1.x.00	Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	IPP	-	-	v	-	-	-	v	-
33	I.1.g.00	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	IPP	v	v	v	v	v	v	v	v
34	A.2.c.02	Pengawasan atas Pengawasan Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
35	A.2.h.01	Pengawasan atas Percepatan Penurunan Stunting	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
36	A.3.d.00	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBD	APD	-	-	-	v	-	-	-	v
37	A.3.e.00	Pengawasan atas Implementasi Bansos APBDesa	APD	-	-	-	v	-	-	-	v
38	A.3.f.01	Pengawasan atas Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	APD	-	-	-	v	-	-	-	v
39	B.1.a.01	Pengawasan atas Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Stimulan Swadaya Perumahan Rakyat)	APD	-	v	-	v	-	v	-	v
40	B.2.a.01	Pengawasan atas Pembangunan Jalan dan Jembatan	APD	-	v	-	v	-	v	-	v
41	C.2.a.00	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	APD	v	-	-	-	v	-	-	-
42	C.2.b.00	Pengawasan atas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	APD	v	v	v	v	v	v	v	v
43	C.2.c.00	Pengawasan atas Optimalisasi PAD	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
44	C.2.d.00	Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
45	C.2.e.00	Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum	APD	-	-	v	-	-	-	v	-
46	C.2.g.00	Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	APD	v	v	v	v	v	v	v	v
47	C.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	APD	v	-	-	-	v	-	-	-
48	C.3.b.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa	APD	v	v	v	v	v	v	v	v
49	C.3.c.00	Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
50	D.3.a.02	Pengawasan atas P3DN - APD	APD	-	v	v	-	-	v	v	-
51	E.3.b.00	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	APD	-	-	v	-	-	-	v	-
52	G.1.a.00	Pengawasan atas Maturitas SPIP/MRI	APD	-	-	-	v	-	-	-	v
53	G.1.b.00	Pengawasan atas Pengelolaan Risiko Sektor Strategis Nasional	APD	v	v	v	v	v	v	v	v
54	H.6.c.00	Pengawasan atas Agenda Prioritas Pengawasan Daerah - Pelaksanaan	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
55	I.1.g.06	Reviu atas Tata Kelola PSN Kawasan Ekonomi Khusus	APD	v	v	v	v	v	v	v	v
56	I.2.b.00	Konsultasi atas Implementasi FMIS pada Pemda	APD	-	-	-	v	-	-	-	v

No	Kode PKPT/PKAU	PKPT/PKAU	Bid/Bag	TRW RMP				TRW RPL			
			Pelaksana	1	2	3	4	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	I.2.c.00	Konsultansi atas Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	APD	-	v	-	-	-	v	-	-
58	I.2.d.00	Konsultansi atas Peningkatan Kualitas Opini LKPD	APD	v	-	-	-	v	-	-	-
59	I.2.e.00	Pengawasan atas Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	APD	-	-	-	v	-	-	-	v
60	I.2.f.00	Bimbingan Teknis atas Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	APD	-	v	-	v	-	v	-	v
61	I.2.h.00	Bimbingan Teknis atas Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	APD	-	v	-	v	-	v	-	v
62	I.2.i.00	Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa	APD	-	v	v	v	-	v	v	v
63	I.1.g.05	Pengawasan atas Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	AN	v	v	v	v	v	v	v	v
64	A.1.d.01	Pengawasan atas Kinerja Pendidikan Tinggi	AN	-	-	v	-	-	-	v	-
65	A.2.a.01	Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional	AN	-	v	-	-	-	v	-	-
66	A.2.c.01	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	AN	-	v	-	-	-	v	-	-
67	B.1.b.01	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM	AN	-	-	v	-	-	-	-	v
68	B.2.e.01	Pengawasan atas Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	AN	-	v	-	v	-	v	-	v
69	C.4.b.00	Pengawasan Akuntabilitas atas BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	AN	-	v	-	-	-	v	-	-
70	C.4.c.00	Pengawasan atas BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	AN	-	v	-	-	-	v	-	-
71	C.4.d.00	Pengawasan Akuntabilitas atas BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	AN	-	v	-	-	-	v	-	-
72	D.2.b.01	Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM	AN	v	-	-	-	v	-	-	-
73	D.3.a.03	Pengawasan atas P3DN pada BLU/D dan BUMD	AN	-	v	-	v	-	v	-	v
74	E.3.a.01	Pengawasan atas Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat - Pelaksanaan	AN	-	-	v	-	-	-	v	-
75	G.1.c.00	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	P3A	v	-	-	-	-	-	-	v
76	G.1.g.00	Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan	AN	-	-	-	v	-	-	-	v
77	H.6.g.00	Pengawasan atas Program Pembangunan Kawasan Pangan Nasional	AN	-	-	v	-	-	-	v	-
78	I.1.r.00	Pengawasan atas Proyek Strategis Nasional Infrastruktur Ketenagalistrikan	AN	v	v	v	v	v	v	v	v
79	I.3.a.00	Pengawasan atas Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa	AN	-	-	v	-	-	-	v	-
80	A.3.a.01	Pengawasan Transformasi dan Menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	Investigasi	v	-	v	-	v	-	v	-
81	A.3.b.01	Pengawasan atas Bauran Program Kesejahteraan Sosial	Investigasi	v	v	v	v	v	v	v	v
82	D.3.a.00	Pengawasan atas P3DN - Investigasi	Investigasi	v	-	-	v	v	-	-	v
83	D.3.d.00	Pengawasan atas Tata Kelola Industri Tambang - Nikel	Investigasi	-	v	-	-	-	v	-	-
84	F.4.a.00	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	Investigasi	v	-	-	-	v	-	-	-
85	F.4.c.00	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	Investigasi	v	-	-	-	v	-	-	-

Agenda Prioritas Pengawasan

No	Topik Pengawasan		Rendal	Target TRW				Pelaksana
	Kode	Topik		1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.1.a	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	D204	-	-	v	-	IPP
2	A.1.c	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	D204	-	-	v	-	IPP
3	A.1.d	Kinerja Pendidikan Tinggi	D204	-	-	v	-	IPP/AN
4	A.2.a	Sistem Kesehatan Nasional	D203	-	v	-	-	IPP/AN
5	A.2.b	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	D203	-	v	-	-	IPP
6	A.2.c	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	D203	-	v	-	-	IPP/AN/APD
7	A.2.d	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	D203	-	v	-	-	IPP
8	A.2.e	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	D203	-	v	-	-	IPP
9	A.2.g	Akuntabilitas penanganan Covid-19	D203	v	-	-	-	IPP
10	A.2.h	Percepatan Penurunan Stunting	D204	-	v	-	-	IPP
11	A.2.i	Skema Kesehatan Adaptif	D203	-	v	-	-	IPP/APD
12	A.3.a	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	D205	v	-	v	-	IPP/INVESTIGASI
13	A.3.b	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	D203	v	v	v	v	IPP/INVESTIGASI
14	A.3.f	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	D203	-	-	-	v	IPP/APD
15	B.1.b	Infrastruktur SPAM	D103	-	v	-	v	IPP/AN
16	B.1.c	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	D105	-	v	-	v	IPP
17	B.2.d	Pembangunan Bandara	D103	-	v	-	v	IPP
18	B.2.e	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	D103	-	v	-	v	IPP/AN
19	B.3.a	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	D204	-	v	-	v	IPP
20	B.3.c	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	D205	v	-	-	-	IPP
21	C.1.e	Akuntabilitas Dana Siap Pakai (DSP) dalam Rangka Penanggulangan Bencana	D203	-	-	v	-	IPP
22	D.3.b	Kemudahan Perizinan Berusaha	D101	-	-	v	-	IPP
23	D.3.f	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	D102	-	-	v	-	IPP
24	G.3.a	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	D202	v	-	-	-	IPP/INVESTIGASI
25	G.3.c	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	D201	-	-	-	v	IPP
26	A.3.d	Implementasi Bansos APBD	D302	-	-	-	v	APD
27	A.3.e	Implementasi Bansos APBDesa	D303	-	-	-	v	APD
28	B.1.a	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	D103	-	v	-	v	APD
29	B.2.a	Pembangunan Jalan dan Jembatan	D105	-	v	-	v	APD
30	C.2.a	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	D301	v	-	-	-	APD
31	C.2.b	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	D301	v	v	v	v	APD

32	C.2.c	Optimalisasi PAD	D301	-	v	-	-	APD
33	C.2.d	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	D301	-	v	-	-	APD
34	C.2.e	Efektivitas Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)	D302	-	-	v	-	APD
35	C.2.g	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	D302	v	v	v	v	APD
36	C.3.a	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	D303	v	-	-	-	APD
37	C.3.b	Akuntabilitas Keuangan Desa	D303	v	v	v	v	APD
38	C.3.c	Akuntabilitas Aset Desa	D303	-	v	-	-	APD
39	E.3.b	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	D302	-	-	v	-	APD
40	G.1.a	Maturnitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	v	APD
41	G.1.b	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	D304	v	v	v	v	APD
42	C.4.b	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	D405	-	v	-	-	AN
43	C.4.c	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	D403	-	v	-	-	AN
44	C.4.d	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	D405	-	v	-	-	AN
45	D.2.b	Akses Permodalan UMKM	D104	v	-	-	-	AN
46	E.3.a	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	D502	-	-	v	-	AN
47	G.1.g	Manajemen Risiko Badan Usaha	D403	-	-	-	v	AN
48	D.3.a	P3DN	D504	v	v	v	v	INVESTIGASI/APD/AN
49	D.3.d	Tata Kelola Industri Tambang, meliputi: - Batubara (TW1); - Timah (TW2); - Bauksit (TW3); - Nikel (TW4)	D503	-	v	-	-	INVESTIGASI
50	F.4.a	Tata Kelola Investasi Sektor Energi	D503	v	-	-	-	INVESTIGASI
51	F.4.c	Tata Kelola dan Akuntabilitas Subsidi Energi	D503	v	-	-	-	INVESTIGASI
52	G.1.e	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	D504	v	-	v	-	INVESTIGASI
53	G.3.b	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	D504	-	v	v	v	INVESTIGASI
54	G.1.c	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	D304	-	-	-	v	P3A